

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN  
PARTISIPATIF TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
BULUKUMBA**

**SKRIPSI**



Oleh  
**FATMAWATI**  
**NIM 105730524515**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2019**

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN  
PARTISIPATIF TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
BULUKUMBA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

**FATMAWATI**

**NIM 105730524515**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2019**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini didedikasikan kepada kedua orang tuaku Patekkai dan Basse serta saudara dan saudariku, Akhmad Rusli dan Wirda Ningsi. Apa yang mereka telah berikan melebihi dari pada apa yang pernah aku inginkan





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba"  
Nama : Fatmawati  
NIM : 105730524515  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 31 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Agus Salim HR., SE., MM  
NIDN: 0911115703

Saida Said, SE., M.Ak  
NIDN: 0910097203

Mengetahui:

Ketua Program Studi,

Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA.CSP  
NBM: 1073428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama **FATMAWATI, NIM 105730524515**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 145/ Tahun 1440 H/ 2019 M, Tanggal 30 Dzulhijjah 1440 H/ 31 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Dzulhijjah 1440 H  
31 Agustus 2019 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E.,MM (.....)  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, S.E.,MM (.....)  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, S.E.,MM (.....)  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Ismail Badollahi, S.E.,M.Si.,Ak.CA.CSP (.....)  
2. Saida Said, S.E.,M.Ak.Ak (.....)  
3. Wa Ode Rayyani, S.E.,M.Si.,Ak.CA (.....)  
4. Asriati, S.E.,M.Si (.....)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatmawati  
Stambuk : 105730524515  
Program studi : Akuntansi  
Dengan Judul : " Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba"

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2019

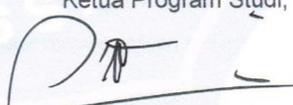
Yang Membuat Pernyataan



Fatmawati

Diketahui oleh:

Dekan  
  
**Ismail Rasulong, SE., MM**  
NBME: 903078

Ketua Program Studi,  
  
**Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA.CSP**  
NBME. 107 3428

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya yang selalu menyertai setiap langkah proses penyelesaian penyusunan dan penulisan skripsi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba” dengan baik. Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan dan maksud untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penyusunan dan penyelesaian ini tidak terlepas dari bantuan dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak. CA.CSP., selaku Ketua Jurusan Akuntansi
4. Bapak Dr. Agus Salim HR, SE., MM., selaku dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar dan senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Ibu Saida Said, SE., M.Ak., selaku dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberi bimbingan yang tentunya bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, petunjuk, dan lain-lain selama proses perkuliahan.
7. Keluarga yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan dan doa yang sangat berarti bagi penulis.
8. Teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Makassar, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan yang kalian berikan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta pihak lainnya yang terlibat membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh peneliti, terima kasih atas dukungan dan bantuannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu kritik maupun saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Makassar, 31 Agustus 2019

Penulis

## ABSTRAK

Fatmawati, Tahun 2019, Analisis Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Agus Salim HR dan Pembimbing II Saida Said.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dengan menggunakan data primer mengenai apakah transparansi, akuntabilitas dan partisipatif berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten bulukumba. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan daerah kabupaten Bulukumba. Sampel yang digunakan sebanyak 50 pegawai. Metode pengujian instrumen pada uji validitas menggunakan korelasi *pearson*, sedangkan reliabilitasnya diuji dengan menggunakan *cronbach alpha*. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linear berganda yang mencakup uji t dan uji R<sup>2</sup>. Semua data yang diperoleh, diolah dengan menggunakan program SPSS for Windows *Release 20.0* yang terlebih dahulu diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik.

Hasil dalam uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid dan reliabel. Hasil uji t menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel partisipatif memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

**Kata Kunci** : Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Laporan Keuangan

## ABSTRACT

Fatmawati, 2019, Transparency, Accountability and Participatory Analysis of the Regional Financial Statements of the Regency of Bulukumba, thesis of the Accounting Study Program at the Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Agus Salim HR and Supervisor II Saida Said.

His study aims to obtain empirical evidence by using primary data on whether Transparency, Accountability and Participatory influence the financial statements of the district of Bulukumba. This type of research used in research is explanatory with a quantitative approach. The population in this study were employees of the regional finance department of Bulukumba district. The sample used was 50 employees. Instrument testing method in the validity test used Pearson correlation, while the reliability is tested using Cronbach alpha. The data analysis technique used to test hypotheses is multiple linear regression which includes t test, F test, and R<sup>2</sup> test. All data obtained were processed using the SPSS for Windows Release 20.0 program which was first tested using the classic assumption test.

The result in the validity and reliability test show that all statement items in the questionnaire were declared valid and reliable. t test results show that transparency and accountability affect the financial statements. Participatory variables have a significant influence on financial statement

Keywords: Transparency, Accountability, Participatory, Financial Statements

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Laporan Keuangan .....	7
B. Transparansi .....	13
C. Akuntabilitas .....	15
D. Partisipatif .....	19
E. Penelitian Terdahulu.....	20
F. Kerangka Konsep.....	25

G. Hipotesis.....	27
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	28
C. Defenisi Operasional Variabel .....	28
D. Populasi dan Sampel .....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
B. Deskripsi Data .....	47
C. Hasil Analisis Data .....	49
D. Pembahasan .....	56
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.1	jenis kelamin	48
Tabel 4.2	Tingkat Pendidikan	48
Tabel 4.3	Usia Responden	49
Tabel 4.4	Uji Validitas Transparansi	51
Tabel 4.5	Uji Validitas Akuntabilitas	51
Tabel 4.6	Uji Validitas Partisipatif	52
Tabel 4.7	Uji Validitas Laporan Keuangan	52
Tabel 4.8	Uji Reliabilitas X	53
Tabel 4.9	Uji Reliabilitas Y	53
Tabel 4.10	Uji t	54
Tabel 4.11	<i>Adjust R Square</i>	56

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konsep	26
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	40



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelayanan masyarakat yang makin meningkat dan berkualitas selalu menjadi perhatian publik. Sejalan dengan peningkatan pelayanan yang lebih baik ini publik juga membutuhkan transparansi keuangan. Transparansi keuangan diartikan sebagai penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat luas (warga), dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah, kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan meningkatkan efektifitas pengawasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan.

★ Transparansi keuangan telah menjadi kebutuhan warga dan telah mendapat perhatian Pemerintah Indonesia. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003), Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan yang mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintah yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan. Pilar-pilar ini menjadi azas dalam semua peraturan pelaksanaan UU17/2003.

Komitmen pemerintah untuk mendukung pelaksanaan transparansi bahkan telah direalisir melalui penetapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU14/2008). Sejumlah perangkat aturan pelaksanaan di tingkat kementerian dan pemerintah daerah telah mengatur bagaimana implementasi UU14/2008 ini.

Dapat dipastikan banyak orang yang bertanya mengapa keuangan yang dikelola suatu lembaga publik harus transparan atau terbuka untuk diketahui warganya? Ada beberapa penjelasan yang dapat menerangkan mengapa transparansi keuangan lembaga public sangat penting :

Pertama, Untuk meningkatkan kepercayaan (*trust*). Pemerintah yang terbuka menyampaikan informasi keuangan kepada publik lebih dipercaya di banding pemerintah yang relative tertutup. Medina and Rufin (2015) menjelaskan bahwa "*Transparency does have both a direct effect on trust and an indirect effect that is mediated by satisfaction*". Pemerintah yang tertutup dengan informasi keuangan dapat dinilai warga memiliki setumpuk rahasia penyelewengan keuangan. Pemerintah menutup informasi keuangan dapat diduga kurang berkompeten dalam mengelola dan melaporkan keuangan. Pemerintah yang tertutup tidak dapat menjelaskan mengapa kinerja pembangunan mereka buruk dan tidak berhasil.

Kedua, untuk meningkatkan pengawasan masyarakat (*controlling*). Untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan warga perlu disertakan dalam pengawasan, dan pengawasan masyarakat ini akan efektif bila warga masyarakat mendapat informasi tentang pembiayaan program atau kegiatan warga menjadi *watch dog* ditingkat lapangan bila perangkat pemerintah tidak ada disana. Pemerintah mempunyai keterbatasan dalam melakukan pengawasan program dan kegiatan, dan untuk membutuhkan dukungan warga masyarakat. Warga masyarakat dapat menilai dan memberikan masukan untuk berbagai kekurangan atau kelalaian pelaksanaan program atau kegiatan bila pemerintah transparan dalam menyampaikan informasi keuangan atau kegiatan.

Ketiga, bahwa warga berhak mendapatkan informasi dan hak untuk mengetahui ( *right to inform and right to know* ). Pasal 14 Undang – undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan “ setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya “. Hak – hak warga Negara menjadi perhatian dan ukuran kualitas demokrasi di setiap Negara. warga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan mengetahui kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada kehidupan warga dan masyarakat. Keuangan yang dialokasi pemerintah juga harus di informasikan secara terbuka (transparan) agar warga dapat menilai kecukupan atau kekurangan untuk membiayai kebijakan, program, dan kegiatan.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKB). Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas.

Akuntabilitas menurut pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap laporan keuangannya mulai dari perencanaan anggaran, pemakaian anggaran serta pelaporan anggaran secara penuh. Akuntabilitas terkait

laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan, dalam hal ini laporan yang mengandung informasi relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan juga laporan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut (Stelcoin dalam Aliyah dan Nahar, 2012).

Selain melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas yang efektif juga tergantung pada kemudahan dari seseorang dalam memperoleh informasi terkait dalam laporan keuangan masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas. Namun, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah mulai surat kabar, internet, atau cara lain belum menjadi hal umum bagi sebagian daerah. Padahal seperti yang kita ketahui penyelenggaraan pemerintah serta akuntabilitas pemerintah yang dapat dilihat melalui laporan keuangan tidak dapat diketahui tanpa adanya pemberitahuan dari pemerintah kepada masyarakat mengenai informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Kita diketahui bersama bahwa memang akuntabilitas pemerintah menjadi fokus utama masyarakat karena akuntabilitas dapat mencegah terjadinya praktek korupsi seperti yang terjadi, karena itu akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar.

Semua informasi tersebut digunakan oleh pihak yang terkait dengan laporan keuangan dari pemerintah tetapi yang paling penting penyajian laporan keuangan pemerintah ini merupakan pertanggung jawaban dari

pemerintah terhadap masyarakatnya sebagai sumber dana. Tujuan-tujuan itulah yang menyebabkan diperlukannya sebuah standar yang paling tidak harus dimiliki oleh laporan yang dibuat pemerintah, standar ini juga memuat pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Persyaratan minimum yang harus dipenuhi laporan keuangan pemerintah paling tidak adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Hal tersebut dapat disebabkan karena organisasi sektor publik merupakan organisasi yang menggunakan sumber dana publik sehingga harus memberikan pertanggung jawaban melalui laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik dari laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas yang telah mencakup pembahasan secara tersirat serta terdapat pula fenomena-fenomena yang sedang terjadi yang berkaitan dengan permasalahan akuntabilitas maupun standar akuntansi pemerintahan, maka judul penelitian ini adalah "Analisis Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten Bulukumba
2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten Bulukumba

3. Apakah Partisipatif berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten Bulukumba

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten Bulukumba
2. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten Bulukumba
3. Untuk mengetahui pengaruh Partisipatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten Bulukumba

### D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah  
Sebagai informasi kepada Pemda Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan roda pemerintahan yang lebih baik pada masa yang akan datang.
2. Bagi Peneliti  
Sebagai wawasan dan proses pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan tentang penerapan akuntansi.
3. Bagi Akademis  
Sebagai bahan pustaka bagi peneliti berikutnya, utamanya peneliti yang ingin mengetahui tentang keuangan daerah umumnya, khususnya Kabupaten Bulukumba.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Laporan Keuangan**

##### **1. Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Secara umum laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Laporan keuangan menurut para ahli sebagai bahan rujukan landasan teori / kajian pustaka karya ilmiah atau karya tulis;

Definisi Laporan Keuangan Menurut Birgham dan Houston, laporan keuangan adalah beberapa lembar kertas yang berisi tulisan angka-angka namun sangat penting juga untuk memikirkan aset nyatanya yang berada dibalik angka tersebut. (Birgham dan Houston,2010)

Pengertian laporan keuangan menurut Subramanyam, laporan keuangan adalah produk akhir dari sebuah pelaporan transaksi keuangan yang penyusunannya diatur oleh standar atau aturan ilmiah akuntansi, insentif manager, mekanisme pelaksanaan dan pengawasan

perusahaan (Subramanyam, 2010:19). Pengetahuan dan pemahaman lingkungan dan pelaporan keuangan yang baik sangat mendukung dalam penyampaian informasi posisi keuangan perusahaan sesungguhnya agar dicapai kinerja perusahaan yang lebih baik.

Menurut Bastian (2005) menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah yang mempresentasikan secara terstruktur posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah.

## **2. Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber data. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber data yang dipercayakan kepadanya.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual menyebutkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah memiliki tujuan, sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode untuk membiayai seluruh pengeluaran.

- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan menurut Mardiasmo (2002) adalah :

- a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta berbagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*)
- b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja material dan organisasional.

### 3. Syarat-Syarat Laporan Keuangan

Syarat-syarat laporan keuangan merupakan ciri khas membuat informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi pemakai dalam

pengambilan keputusan bernilai ekonomis. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi didalam membuat laporan keuangan :

a. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Dalam hal ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

c. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan.

Selain itu informasi harus diarahkan pada kebutuhan pemakai, dan tidak tergantung pada kebutuhan atau keinginan pihak tertentu. Dalam hal menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu maka ketidakpastian tersebut diakui dengan mengungkapkan hakikat dan tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat. Agar dapat diandalkan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialistis dan biaya (kelengkapan). Kesenjangan untuk tidak mengungkapkan dapat mengakibatkan informasi menjadi tidak benar dan menyesatkan.

d. Dapat Dibandingkan

Pemakaian laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan. Pemakaian juga harus dapat mempertimbangkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, serta perusahaan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu,, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antara periode yang sama, dan untuk perusahaan yang berbeda.

e. Mempunyai Daya Uji

Laporan keuangan yang telah disusun dengan panduan konsep-konsep dasar akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi yang

sudah di sayahkan, sehingga dapat diuji kebenarannya oleh pihak lain.

f. Netral

Laporan keuangan yang disajikan bersifat umum, objektif dan tidak memihak kepada kepentingan pemakai tertentu.

- a) Tepat waktu artinya bahwa laporan keuangan harus disajikan tepat waktu
- b) Lengkap artinya bahwa laporan keuangan yang disusun harus memenuhi syarat-syarat tersebut diatas dan tidak menyesatkan pembaca.

**4. Fungsi Laporan Keuangan**

a. Sebagai Bahan Review

*Financial statement* dapat memberikan data atau informasi komprehensif tentang posisi keuangan perusahaan. Hal ini bisa menjadi ulasan mengenai kondisi perusahaan secara menyeluruh, khususnya kondisi keuangan (aset, utang, biaya operasional, dan lain-lain)

b. Sebagai Pedoman Membuat Keputusan

Salah satu fungsi penting dibuatnya laporan mengenai kondisi keuangan perusahaan adalah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan penting bagi perusahaan.

c. Membantu Menciptakan Strategi Baru

Selain membantu proses pengambilan keputusan penting, *Financial statement* juga dapat dipakai untuk menciptakan strategi baru oleh perusahaan dalam upaya meningkatkan performa usaha

d. Meningkatkan Kredibilitas Perusahaan

Perusahaan yang membuat *Financial statement* menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan suatu sistem perekapan data yang terpercaya, akurat, dan tidak sembarangan dalam pengambilan keputusan.

**5. Jenis-jenis Laporan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary repots*) dan laporan pinansial, yang diuraikan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

**B. Transparansi**

**1. Pengertian Transparansi**

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang

tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Adapun beberapa pengertian tentang transparansi yaitu :

Menurut Nico Andrianto (2007:20) Transparansi adalah “Keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.”

Menurut Abdul Hafiz (2000:40) Tanjung Transparan adalah “Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Dari kedua definisi di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

## **2. Indikator Transparansi**

Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, dan hasil yang dicapai. Prinsip ini menekankan 2 aspek yaitu :

- a. Komunikasi publik oleh pemerintah
- b. Hak masyarakat terhadap akses informasi

menurut Krina (2003:17) Indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab.
- b. Kemudahan akses informasi.
- c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
- d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

## C. Akuntabilitas

### 1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas publik hanya dikenal di negara yang menerima konsep-konsep demokrasi yang menganggap rakyat sebagai faktor yang sangat penting. Asas akuntabilitas menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara.

Ada beberapa definisi tentang akuntabilitas diantaranya adalah :

Menurut Mardiasmo (2002:20) akuntabilitas publik adalah "Kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

## 2. Sifat Akuntabilitas

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif, dari perspektif akuntansi, *American Accounting Association* mengatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap :

- a. sumber daya financial.
- b. kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administrative.
- c. efesiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan.
- d. hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (*legal compliance*) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif. Tahap-tahap tersebut adalah :

- a. *Probity and legality accountability* Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*).
- b. *Proces accountability* Dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (*planning, allocating and managing*).
- c. *Performance accountability* Pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (*efficient and economy*).
- d. *Program accountability* Di sini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (*outcomes and effectiveness*).
- e. *Policy accountability* Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan di terapkan atau tidak (*value*).

Akuntabilitas pemerintah di negara yang menganut paham demokrasi sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat. Pemerintahan demokrasi menjalankan dan mengatur kehidupan rakyat dalam bernegaradengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengambil dan menggunakan sumber dana masyarakat. Pemerintah wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua aktivitasnya kepada masyarakat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintah dalam pengaturan perdagangan dan industri, perlindungan hak asasi dan kepemilikan serta penyediaan jasa sosial, timbul kesadaran yang luas untuk menciptakan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang lebih komprehensif. Sistem tersebut antara lain meliputi sistem anggaran pendapatan dan belanja, organisasi pelayanan pemerintah, manajemen wilayah yang profesional serta pengembangan praktik akuntansi dan pelaporan keuangan.

Ternyata dalam pelaksanaannya, keinginan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya dengan informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif. Beberapa teknik yang dikembangkan untuk memperkuat sistem akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh metode yang banyak dipakai dalam akuntansi, manajemen dan riset seperti *management by objectives*, anggaran kinerja, riset operasi, audit kepatuhan dan kinerja, akuntansi biaya, analisis keuangan dan survey yang dilakukan terhadap

masyarakat sendiri. Teknik-teknik tersebut tentunya juga dipakai oleh pemerintah sendiri untuk meningkatkan kinerjanya.

## D. Partisipatif

### 1. Pengertian Partisipatif

Partisipatif berasal dari kata dalam bahasa Inggris *participation* yang artinya pengikutsertaan atau pengambilan bagian. Partisipatif berarti keterlibatan mental serta emosi seseorang untuk pencapaian sesuatu tujuan dan orang tersebut ikut bertanggung jawab di dalamnya.

Menurut Davis dan Newstrom (2004) Partisipatif adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok dan mendorong mereka untuk memberikan suatu kontribusi demi tujuan kelompok, sojagyo dan juga berbagai tanggung jawab dalam pencapaian tujuan.

Partisipatif adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya. Pengertian ini menjelaskan peran masyarakat dalam mengambil bagian, atau turut serta menyumbangkan tenaga dan fikiran ke dalam suatu kegiatan, berupa keterlibatan ego atau diri sendiri atau pribadi yang lebih dari pada sekedar kegiatan fisik semata. Secara umum, partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan diri seseorang dalam suatu kegiatan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung atau suatu proses identifikasi diri seseorang untuk menjadi peserta dalam kegiatan bersama dalam situasi sosial tertentu. Munculnya paradigma pembangunan partisipatif mengidentifikasikan adanya dua perspektif:

- a) Munculnya pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan serta operasional dan pemeliharaan program yang akan mewarnai hidup mereka, sehingga dapat dijamin bahwa persepsi setempat, pola sikap dan pola pikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh.
- b) Membuat umpan balik (*feedback*) yang pada hakekatnya merupakan bagian tak terlepaskan dari kegiatan pembangunan.

#### E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

#### Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN
1	Surya Pratolo (2016)	Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam Hubungannya Dengan Perwujudan Keadilan dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur dan Masyarakat di Era Otonomi Daerah	Deskriptif kualitatif	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis jalur menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintah daerah mempengaruhi

				kinerja pemerintah daerah.
2	Vonny Novisa Amril (2016)	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD	Kausatif	Akuntabilitas publik tidak berpengaruh signifikan positif, Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Sijunjung.
3	Muhammad Firdiansyah Adiwirya (2015)	Akuntabilitas, Transparansi Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar	Deskriptif kuantitatif	Dikaji secara parsial, ditemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh pada anggaran berbasis kinerja sedangkan transparansi berpengaruh positif pada anggaran berbasis kinerja.
4	Ni Luh Putu Uttari Premananda (2017)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Denpasar	Deskriptif kuantitatif	Secara parsial maupun serentak akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi anggaran berpengaruh positif pada kinerja anggaran.

5	Febriana F. Albugis (2016)	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Deskriptif kualitatif	Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bisa dikatakan efisien dengan adanya surplus anggaran, dengan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Pemerintah Sulawesi Utara telah berjalan dengan cukup baik hingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
6	Salomi J. Hehanussa (2015)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon	Kuantitatif	Hasil pengujian secara empiris membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

7	Tari Mellisa Rafar (2015)	Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh)	Deskriptif Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa, kompetensi pengelola keuangan dan akuntabilitas baik secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.
8	Irna Setianningrum (2017)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money pada Badan Usaha Milik Daerah (Bumnd) Di Yogyakarta	Asosiatif Kausal	Akuntabilitas, transparansi dan pengawasan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep <i>Value for money</i> pada badan usaha milik daerah (BUMN) di yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai

				<p>koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,564; 0,119; dan 0,222 dan nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel (61,864 &gt; 3,16) serta nilai signifikansi yang lebih kecil dari pada nilai signifikansi 5% (0,000 &lt; 0,050).</p>
9	Denny Boy (2011)	<p>Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid</p>	<p>Deskriptif Kuantitatif</p>	<p>Sikap akuntabel dan transparan satuan pendidikan dalam pengelolaan APBS jika dilakukan baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan. Jika dibandingkan antara sikap akuntabilitas dan</p>

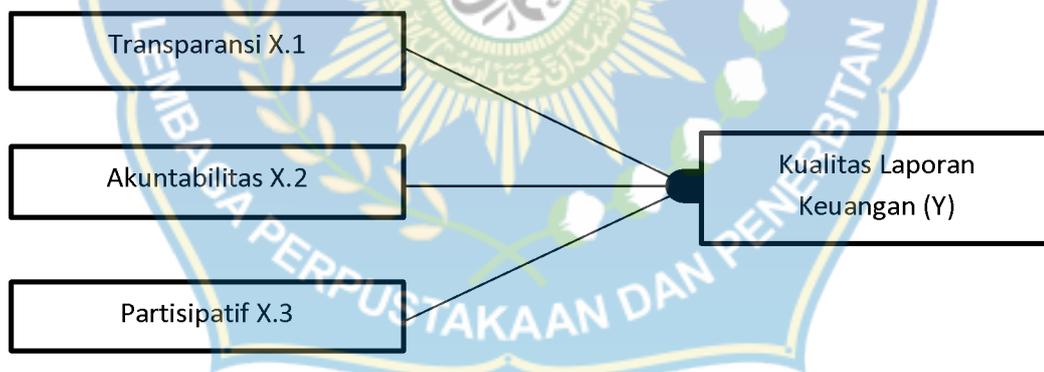
				<p>transparansi, pengaruh akuntabilitas lebih kuat dibandingkan pengaruh transparansi terhadap partisipasi orang tua murid. Semakin akurat dan tepat waktu pelaporan penggunaan dana yang dikumpulkan dari orang tua murid dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.</p>
--	--	--	--	---

#### F. Kerangka Konsep

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 tahun 2005, pasal 4). Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah

suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.

Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemda. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Kerangka fikir dari penelitian ini dapat dilihat dari gambar 2.1 sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

**Kerangka Konsep**

## G. Hipotesis

Berdasarkan pada uraian dibagian Tinjauan Pustaka, berikut ini adalah perumusan hipotesis:

H1 : Apakah transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah

H2 : Apakah akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah

H3 : Apakah partisipatif berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis eksplanatori dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur (*measurabel*) atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Proses pengukuran adalah bagian sentral dalam penelitian kuantitatif, karena hal tersebut memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Adapun jenis penelitian eksplanatori yaitu analisis yang menguji hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Bupati Bulukumba tepatnya di Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Loka, Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sedangkan waktu dalam penelitian ini adalah selama 2 bulan.

#### **C. Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran**

Menurut Darmawan (2013), variabel penelitian pada dasarnya merupakan suatu hal yang dapat berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti yang bertujuan untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Adapun variabel dependen dan independen dalam penelitian ini yaitu:

## 1. Variabel Dependen atau Variabel Terikat

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kualitas laporan keuangan daerah. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

## 2. Variabel Independen atau Variabel Bebas

### a. Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

### b. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik hanya dikenal di negara yang menerima konsep-konsep demokrasi yang menganggap rakyat sebagai faktor yang sangat penting. Asas akuntabilitas menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara.

c. Partisipatif

Partisipatif adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya. Pengertian ini menjelaskan peran masyarakat dalam mengambil bagian, atau turut serta menyumbangkan tenaga dan fikiran ke dalam suatu kegiatan, berupa keterlibatan ego atau diri sendiri atau pribadi yang lebih dari pada sekedar kegiatan fisik semata. Secara umum, partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan diri seseorang dalam suatu kegiatan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung atau suatu proses identifikasi diri seseorang untuk menjadi peserta dalam kegiatan bersama dalam situasi sosial tertentu.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiono (2014:20) populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dari penelitian ini adalah tentang transparansi, akuntabilitas dan partisipatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2. Sampel

Sampel adalah bagian jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono:2012). Pemilihan sampel penelitian didasarkan pada metode *purposive sampling* yaitu teknik melibatkan hanya pada bidang tertentu dan terlibat langsung dengan kualitas

laporan keuangan, seperti bagian pengelola keuangan. Adapun jumlah sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah 50 orang.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber:

### 1. Data Primer

#### a. Survei

Survei atau lengkapnya self-administered survey adalah metode pengumpulan data primer dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian. Kuesioner berisi daftar pernyataan yang ditujukan kepada responden untuk diisi.

### 2. Data Sekunder

#### a. Akses internet

Akses internet yaitu mencari data-data pendukung dari *ebook*, maupun jurnal-jurnal tersedia.

#### b. Studi kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu dilakukan dengan mempelajari literatur, catatan-catatan kuliah, bahan tulisannya lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

## F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis korelasi kuantitatif. Sehingga teknik analisis yang tepat untuk digunakan yaitu analisis regresi linier berganda untuk pengujian variabel bebas lebih dari satu.

### 1. Uji Kualitas Data

#### a. Uji Validitas

Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur sesuatu yang hendak diukur dan dapat mengungkapkan variabel yang hendak diteliti secara cepat. Validitas diuji dengan menggunakan besarnya korelasi antarvariabel.

#### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menggunakan koefisien alpha ( $\alpha$ ). Jika hasil uji nilai  $\alpha$  diatas 0,6 dan dilaksanakan pengukuran berulang dan tetap menghasilkan  $\alpha$  diatas 0,6 maka data tersebut dinyatakan reliabel (dapat dipercaya).

### 2. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk menguji kekuatan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas (Indriantoro dan nisfi, 2013). Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$y = \alpha + \beta x_1 + \beta x_2 + \beta x_3$$

Keterangan:

$Y$  = variabel terikat (kualitas laporan keuangan)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

$\times_1$  = Transparansi

$\times_2$  = Akuntabilitas

$\times_3$  = Partisipatif

Analisis data secara keseluruhan akan menggunakan *software* SPSS 20 for windows. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara persial. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak berarti  $H_1$  diterima (Nisfiannoor, 2009:174).

Uji determinasi juga dilakukan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat uji determinasi menggunakan tabel *model summary* pada uji SPSS. Persentase dapat dilihat pada kolom R Square dikalikan 100%.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada gambaran lokasi penelitian akan menyajikan dua gambaran umum, yaitu gambaran umum daerah Kabupaten Bulukumba, dan gambaran umum mengenai Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Gambaran umum Kabupaten Bulukumba mencakup keadaan geografis, kependudukan serta visi dan misi Kabupaten Bulukumba. Sedangkan gambaran Pemerintah Kabupaten Bulukumba meliputi uraian tugas dan fungsi serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba

###### a. Kondisi Geografis

Kabupaten bulukumba berada pada koordinat 5°20" sampai 5°40" Lintang Selatan dan 119°50" sampai 120°28" Bujur Timur. Kabupaten yang berada pada bagian selatan Propinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan kabupaten atau kota lain yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Selayar. Di sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone sedangkan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.

Luas wilayah kabupaten Bulukumba adalah 1.154,67 km<sup>2</sup>. Wilayah Kabupaten Bulukumba terbagi dalam 10 kecamatan, 27 kelurahan serta 109 desa. Wilayah kabupaten Bulukumba sebagian besar berupa daratan rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25

meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke Utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan tofografi daratan rendah sampai bergelombang. Luas daratan rendah sampai bergelombang dan daratan tinggi hampir berimbang, yaitu jika daratan rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28% maka daratan tinggi mencapai 49,72%.

Tanah di Kabupaten Bulukumba didominasi jenis tanah latosol dan mediteran. Secara spesifik terdiri atas tanah alluvial hidromorf coklat kelabu dengan bahan induk endapan liat pasir terdapat dipesisir pantai dan sebagian di daratan bagian utara. Sedangkan tanah regosol dan mediteran terdapat pada daerah-daerah bergelombang sampai berbukit di wilayah bagian barat. Wilayah kabupaten Bulukumba dilalui oleh 32 aliran yang terdiri dari sungai

besar dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 603,50 km dan yang terpanjang adalah sungai Sangkala yakni 65,30 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai Biroro yakni 1,50 km. Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23.365 Ha.

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C – 27,68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembab atau agak basah. Kabupaten Bulukumba berada di sektor timur, musim gadu antara Oktober – Maret dan musim rendengan antara April – September. Terdapat 8 buah stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni: stasiun Bettu, stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun Batukaropa, stasiun Tanah Kongkong, stasiun Bontobahari, stasiun Bulu-bulu dan stasiun Herlang. Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang sedangkan pada bagian selatan curah hujannya rendah. Curah hujan antara 800 – 1000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Ujungbulu, sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe, dan sebagian besar Bontobahari. Curah hujan antara 1000 -1500 mm/tahun, meliputi sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian Bontotiro. Curah hujan antara 1500 -2000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Gantarang, sebagian Rilau Ale, sebagian Ujung Loe, sebagian Kindang, sebagian Bulukumpa,

sebagian Bontotiro, sebagian herlang dan Kecamatan Kajang. Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Herlang.

b. Kondisi Demografi

Dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba pada tahun 2014 memiliki jumlah penduduk mencapai 435.035 jiwa, yang berada di 10 Kecamatan dengan kepadatan penduduk 376,76 orang per Km<sup>2</sup> dan ini berarti mengalami peningkatan daritahun sebelumnya yakni tahun2013 dengan kepadatan penduduk 433.873 jiwa dengan kepadatan penduduk 375,75 orang per Km<sup>2</sup>.

Dilihat dari jenis kelamin, maka dari total jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba terdapat 217.515 atau 49,99% laki-laki dan 217.520 atau 50,01% perempuan. Dengan demikian, secara keseluruhan penduduk laki-laki di Kabupaten Bulukumba jumlahnya hampir sama dengan penduduk perempuan bedanya hanya 0,1%.

**2. Visi Dan Misi Kabupaten Bulukumba**

a. Visi

“Masyarakat Bulukumba Yang Sejahtera Dan Terdepan Melalui Optimalisasi Potensi Daerah Dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Yang Dilandasi Pada Pemerintahan Yang Demokratis Dan Religius”

b. Misi

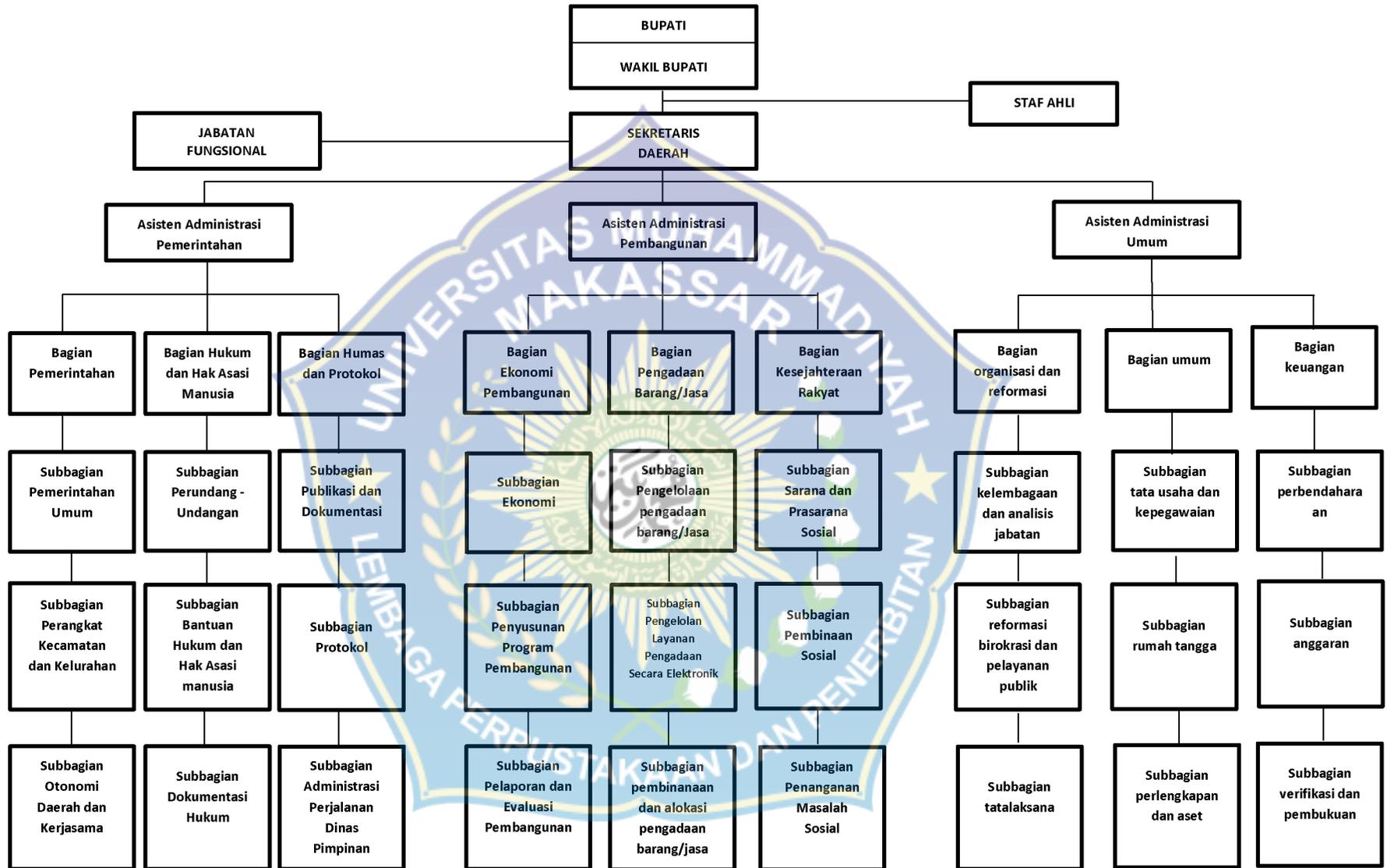
- 1) Meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan;
- 2) Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah;
- 3) Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah;
- 4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berjiwa kompetitif;
- 5) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*) serta penekanan supremasi hukum dan hak azasi manusia;
- 6) Meningkatkan kerjasama antar daerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antar daerah;
- 7) Penataan ruang dan pelestarian sumber alam dan lingkungan, budaya, dan penanggulangan bencana;
- 8) Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman, tertip dan religius didalam kehidupan bermasyarakat.

### 3. Struktur Organisasi

Organisasi adalah sekelompok orang yang secara formal di persatukan dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi

atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut dikoordinasikan. Selain dari pada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.





## 1. Bupati

Bupati memiliki tugas berbeda dengan wakil bupati. Berikut ini beberapa tugas bupati.

- 1) Memimpin jalannya pelaksanaan setiap urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah berdasarkan ketentuan Memimpin jalannya pelaksanaan setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD tingkat kabupaten. Ini juga merupakan salah satu fungsi DPRD.
- 2) Memelihara ketenteraman dan ketertiban di tengah masyarakat
- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda (Peraturan Daerah) tentang RPJPD (Rencana Jangka Panjang Daerah) dan RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah) kepada DPRD kabupaten untuk dibahas bersama mereka, serta menyusun dan menetapkan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah).
- 4) Menyusun dan mengajukan Raperda tentang APBD, Raperda tentang perubahan APBD, dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD Kabupaten untuk dibahas bersama.
- 5) Mewakili daerah kabupatennya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 6) Mengusulkan adanya pengangkatan Wakil Bupati
- 7) Melaksanakan tugas yang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain memiliki tugas pokok seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bupati juga memiliki tugas-tugas lain yang melekat pada jabatan tersebut, seperti berikut ini:

- 1) Ketua FORKOPIMDA (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) tingkat Kabupaten. Forum ini merupakan ajang kolaborasi untuk sinergisitas yang beranggotakan bupati dan para pimpinan kecamatan.
- 2) Memegang Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Kabupaten dan mewakili pemerintah kabupaten dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tugas ini melekat pada jabatan bupati atas dasar Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Ketua KOMINDA atau Komunitas Intelijen Daerah. komunitas ini merupakan pendukung dari BIN (Badan Intelijen Nasional). Tugas ini melekat pada jabatan bupati berdasarkan Permendagri No. 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

Selain memiliki tugas, bupati juga memiliki kewenangan dan kekuasaan yang akan mendukung pelaksanaan dari setiap tugas yang dimiliki olehnya. Berikut ini beberapa wewenang bupati:

- 1) Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
- 2) Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD Kabupaten.
- 3) Menetapkan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- 4) Mengambil setiap tindakan tertentu dalam keadaan mendesak apapun yang sangat dibutuhkan oleh Kabupaten dan/atau masyarakat.
- 5) Melaksanakan setiap wewenang lain sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, bupati juga memiliki beberapa kewajiban yang sangat berkaitan erat dengan jabatan itu sendiri. Berikut ini beberapa kewajiban bupati:

- 1) Berpegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berusaha mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
- 2) Menaati seluruh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi dalam masyarakat.
- 4) Menjaga etika dan norma yang berlaku dalam pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- 5) Menerapkan setiap prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik
- 6) Melaksanakan setiap program strategis nasional;
- 7) Menjalin hubungan kerja yang baik dengan seluruh instansi vertikal di kabupaten dan semua perangkat daerah.

## 2. Tugas Wakil Bupati dalam Pemerintahan

Wakil bupati memiliki banyak tugas yang berat dalam mendampingi bupati. Berikut ini beberapa tugas wakil bupati dalam pemerintahan:

- 1) Membantu Bupati dalam memimpin jalannya pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, mengatur kegiatan Perangkat Daerah, menindaklanjuti setiap laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, memantau dan mengevaluasi setiap penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten.
- 2) Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerahnya.
- 3) Melaksanakan setiap tugas dan wewenang Bupati jika Bupati menjalani masa tahanan atau memiliki halangan sementara.
- 4) Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, wakil bupati juga memiliki tugas lain yang melekat pada jabatannya. Berikut ini beberapa tugas lain dari wakil bupati:

- 1) Memimpin Badan Narkotika Kabupaten (BNK).
- 2) Penanggung jawab dari Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Kabupaten.

Wakil bupati juga memiliki beberapa kewajiban lain yang berkaitan erat dengan jabatan yang dimilikinya. Berikut ini beberapa kewajiban tersebut:

- 1) Mengamalkan dan berpegang teguh pada Pancasila, melaksanakan UUD Tahun 1945 dan mempertahankan juga memelihara keutuhan NKRI.
- 2) Menaati seluruh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi dalam masyarakat.
- 4) Menjaga etika dan norma yang berlaku dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5) Menerapkan setiap prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
- 6) Melaksanakan setiap program strategis nasional.
- 7) Menjalin hubungan kerja yang baik dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

Uraian yang telah disampaikan di atas merupakan penjelasan secara lengkap mengenai Tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang dapat penulis sampaikan kepada pembaca dalam kesempatan yang indah kali ini. Semoga dengan membaca artikel ini pembaca dapat memahami secara lebih baik apa itu bupati dan wakil bupati serta apa saja tugas dari jabatan tersebut menurut undang-undang. Perlu kita pahami bersama bahwa adanya walikota dan tugas-tugasnya dalam masyarakat merupakan hal yang tidak akan pernah lepas dari usaha pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. sampai jumpa pada kesempatan yang lain dan semoga kesuksesan senantiasa mengiringi langkah pembaca dalam menjalani hidup.

### 3. Staf Ahli

- 1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap isu-isu strategis mengenai hukum dan politik
- 2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas dibagian kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- 3) Staf Ahli Bidang Ekonomi, mempunyai tugas dibagian Keuangan dan Pembangunan.

### 4. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

### 5. Sekretaris Daerah

Bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

### 6. Asisten Administrasi Pemerintahan

Asisten pemerintah adalah unsur staf sekretariat daerah yang dipimpin oleh seorang asissten berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekertaris daerah. Asisten pemerintah mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas sekertaris daerah dalam penyelenggaraan tata pemerintahan, hukum, organisasi dan

tata laksana serta kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan hak asai manusia.

#### **7. Asisten Administrasi pembangunan**

Asisten administrasi pembangunan adalah Unsur staf sekretariat daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah. Asisten administrasi pembangunan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas sekretaris daerah dalam penyelenggaraan pembinaan hubungan masyarakat, perekonomian, pembangunan serta pembinaan pemuda dan olahraga.

#### **8. Asisten Administrasi umum**

Mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan organisasi, umum, protokol, kepegawaian dan keuangan.

### **B. Deskripsi Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada responden dan mendatangi langsung lokasi pengambilan sampel. Populasi dari penelitian ini yaitu pegawai yang terlibat langsung dengan laporan keuangan. Pertanyaan yang diajukan seputar transparansi, akuntabilitas dan partisipatif yang mempengaruhi kinerja kualitas laporan keuangan daerah. Kemudian data yang diperoleh dari jawaban responden atas pernyataan yang diajukan, selanjutnya diolah menggunakan SPSS dan selanjutnya data responden yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

## 1. Karakteristik Responden

### a. Jenis Kelamin

Tabel 4.1  
Responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki laki	27	54%
Perempuan	23	46%
Jumlah	50	100%

Sumber: Kuesioner Penelitian, 2019

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa jumlah pegawai pemerintah daerah kabupaten bulukumba untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 27 pegawai dari 50 responden, sementara perempuan sebanyak 23 pegawai dari 50 responden.

### b. Jenjang Pendidikan

Tabel 4.2  
Responden berdasarkan jenjang pendidikan

Jenjang pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
Sma	10	20%
Diploma	1	2%
Strata 1	31	62%
Strata 2	7	14%
Strata 3	1	2%
Jumlah	50	100%

Sumber: Kuesioner Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 menjelaskan bahwa kantor pemerintah daerah kabupaten bulukumba berpendidikan SMA/ sederajat sebanyak 10 orang dari 50 responden, berpendidikan diploma sebanyak 1 orang

dari 50 responden, berpendidikan S1 sebanyak 31 orang dari 50 responden, berpendidikan S2 sebanyak 7 orang dari 50 responden dan yang berpendidikan S3 sebanyak 1 orang dari 50 responden.

c. Usia Responden

Tabel 4.3  
Responden berdasarkan Usia Responden

Usia	Jumlah	Persentase (%)
30-35	6	12%
36-40	7	14%
41-45	11	22%
46-50	13	26%
51-55	12	24%
56-60	1	2%
Jumlah	50	100%

Sumber: Kuesioner Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel 4.3 menjelaskan bahwa jumlah pegawai kantor pemerintah daerah kabupaten bulukumba yang berusia 30-35 tahun sebanyak 6 orang dari 50 responden, berusia 36-40 tahun sebanyak 7 orang dari 50 responden, berusia 41-45 tahun sebanyak 11 orang dari 50 responden, berusia 46-50 tahun sebanyak 13 orang dari 50 responden, berusia 51-55 tahun sebanyak 12 orang dari 50 responden dan yang berusia 56-60 tahun sebanyak 1 orang dari 50 responden.

## C. Hasil Analisis Data

### 1. Uji Validitas

Uji validitas adalah esens kebenaran penelitian. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur serta

dapat mengungkapkan data dan variabel yang akan diteliti secara tepat. Uji validitas *product moment pearson correlation* menggunakan prinsip mengkorelasikan atau menghubungkan antara masing-masing skor item dengan skor total yang diperoleh dalam penelitian. Setiap uji dalam  $r_{tabel}$  acuan untuk membuat kesimpulan, begitupun uji validitas *product moment pearson correlation*, dalam uji validitas ini dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$ , maka kuesioner dinyatakan valid, sedangkan
- b. Jika  $r_{hitung}$  lebih kecil dari  $r_{tabel}$ , maka kuesioner dinyatakan tidak valid.

Melakukan pengujian korelasi pada taraf signifikan 0,05 atau 5% (ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian), artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Penelitian ini menggunakan item pernyataan dalam kuesioner dengan jumlah responden 50. Sesuai dengan rumus yang digunakan ( $df= n-2$ ) maka akan menjadi  $df=50-2$  yaitu 48 ( $df=48$ ). Berdasarkan kriteria dengan ketentuan  $df$  atau *degree of freedom* yang didapat ( $df=48$ , dengan sig 5% atau 0,05) maka nilai  $r$ -Tabel sebesar 0,278. setelah diketahui angka  $r_{tabel}$  maka selanjutnya dibandingkan dengan  $r_{hitung}$  yang ditemukan melalui hasil SPSS.

Tabel 4.4  
Variabel Transparansi (X1)

Variable	$r_{hitung}$	$r_{table}$	Keterangan
X1.1	0,360	0,278	VALID
X1.2	0,440	0,278	VALID
X1.3	0,456	0,278	VALID
X1.4	0,603	0,278	VALID
X1.5	0,595	0,278	VALID

Sumber: Kuesioner penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa X1.1 hingga X1.5 pada variable X menghasilkan nilai  $r_{hitung} > r_{table}$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrument pada penelitian ini dikatakan valid.

Tabel 4.5  
Variabel Akuntabilitas (X2)

Variabel	$r_{hitung}$	$r_{table}$	Keterangan
X2.1	0,646	0,278	VALID
X2.2	0,633	0,278	VALID
X2.3	0,828	0,278	VALID
X2.4	0,613	0,278	VALID
X2.5	0,367	0,278	VALID

Sumber: Kuesioner penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa X2.1 hingga X2.5 pada variable X menghasilkan nilai  $r_{hitung} > r_{table}$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrument pada penelitian ini dikatakan valid.

Tabel 4.6  
Variabel Partisipatif (X3)

Variable	$r_{hitung}$	$r_{table}$	Keterangan
X3.1	0,614	0,278	VALID
X3.2	0,724	0,278	VALID
X3.3	0,664	0,278	VALID
X3.4	0,539	0,278	VALID
X3.5	0,672	0,278	VALID

Sumber: Kuesioner penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa X3.1 hingga X3.5 pada variable X menghasilkan nilai  $r_{hitung} > r_{table}$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrument pada penelitian ini dikatakan valid.

Tabel 4.7  
Variabel Laporan Keuangan (Y)

Variable	$r_{hitung}$	$r_{table}$	Keterangan
Y1	0,598	0,278	VALID
Y2	0,773	0,278	VALID
Y3	0,769	0,278	VALID
Y4	0,720	0,278	VALID
Y5	0,754	0,278	VALID

Sumber: Kuesioner penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Y1 hingga Y5 pada variable Y menghasilkan nilai  $r_{hitung} > r_{table}$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrument pada penelitian ini dikatakan valid.

## 2. Uji reliabilitas

Tabel 4.8  
Uji Reliabilitas Transparansi

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.808	15

Sumber: hasil output SPSS 20, 2019

Hasil pengujian ini dapat dilihat bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipatif memiliki item pernyataan sebanyak 15 dengan nilai *Cronbach's Alpha* 0,808. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa semua item pernyataan di kinerja sistem informasi akuntansi dikatakan reliable karena nilai *Cronbach's Alpha* diatas 0,6.

Tabel 4.9  
Uji reliabilitas kualitas laporan keuangan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.770	5

Sumber: hasil output SPSS 20, 2019

Pada pengujian ini dapat dilihat bahwa pada kualitas laporan keuangan memiliki item pernyataan sebanyak 5 dengan nilai *Cronbach's Alpha* 0,770. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa semua item pernyataan di kinerja sistem informasi akuntansi dikatakan reliable karena nilai *Cronbach's Alpha* diatas 0,6.

### 3. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi adalah analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi linear berganda dimaksudkan untuk menguji sejauh mana dan arah pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Sedangkan variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan tabel pada lampiran 3 uji *regression*, dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut

$$y = 8,120 + 0,111 + 0,091 + 0,520$$

a) Uji t

Tabel 4.11

Uji t

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.120	2.916		2.785	.008
Transparansi	.111	.090	.139	1.232	.224
Akuntabilitas	.091	.092	.119	.985	.330
Partisipatif	.520	.103	.629	5.052	.000

a. Dependent Variable: Laporan\_Keuangan

Hasil output SPSS 20, 2019

Uji t bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh persial (sendiri) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak berarti  $H_1$  diterima.

$$t_{tabel} = T(\alpha/2; r-k-1) = t(0,05/2; 50-3-1) = t(0,025; 46) = 2,012$$

1) Transparansi

Pada tabel koefisien kolom model 1 terdapat nilai signifikan 0,224 nilai signifikansi yang ditunjukkan tersebut lebih besar dari nilai 0,05, yang berarti H<sub>1</sub> ditolak. Nilai t negatif menunjukkan variabel X<sub>1</sub> tidak memiliki hubungan yang searah dengan Y. Transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2) Akuntabilitas

Pada tabel koefisien kolom model 1 dilihat bahwa nilai signifikansinya 0,330. Nilai signifikansi yang ditunjukkan tersebut lebih besar dari nilai 0,05, yang berarti H<sub>2</sub> ditolak. Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel X<sub>2</sub> tidak memiliki hubungan yang searah dengan Y. Akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan keuangan

3) Partisipatif

Pada tabel koefisien kolom model 1 dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang ditunjukkan tersebut lebih kecil dari nilai 0,05, yang berarti H<sub>3</sub> diterima. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X<sub>3</sub> memiliki hubungan yang searah dengan Y. Partisipatif memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan keuangan.

b) Uji determinasi

Uji determinasi atau disebut juga R<sup>2</sup> adalah suatu besaran yang menunjukkan berapa proporsi variasi variabel independen atau X yang mampu menjelaskan variasi variabel dependen atau Y.

Nilai koefisien determinasi terletak pada tabel model summary dan tertulis R Square untuk 2 variabel dan *adjusted R Square* lebih dari 2 variabel. Nilai ini dikatakan baik, jika diatas 0,5 karena ini berkisar antara 0 sampai dengan 1.

Tabel 4.12  
Adjusted R Square

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.674 <sup>a</sup>	.454	.418	1.275

a. Predictors: (Constant), Partisipatif, Transparansi, Akuntabilitas  
Sumber: Hasil output SPSS 20, 2019

Pada tabel model summary diatas, diketahui R Square sebesar 0,454. Nilai R Square yang didapatkan dikali 100% menjadi 45,5%. Ini mengartikan bahwa pada variabel X (Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif) memiliki nilai sebesar 45,5% sedangkan sisanya 54,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### D. Pembahasan

##### 1. Pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan

Hasil pengujian yang dilakukan bahwa hipotesis pertama ditolak. Hipotesis pertama menunjukkan variabel transparansi terhadap kualitas laporan keuangan dimana nilai signifikannya sebesar  $0,224 > 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surya Pratolo (2016), Muhammad Firdiansyah Adiwirya (2015), Ni Luh Putu Uttari Premananda (2017), Denny Boy (2011), Irna Setianningrum (2017), Salomi J. Hehanussa (2015) bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap laporan keuangan.

2. Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan

Hasil pengujian yang dilakukan bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) ditolak. Hipotesis pertama menunjukkan variabel akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan dimana nilai signifikannya sebesar  $0,330 > 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pemakai tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Surya Pratolo (2016), Ni Luh Putu Uttari Premananda (2017), Denny Boy (2011), Tari Mellisa Rafar (2015) Febriana F. Albugis (2016), Vonny Novisa Amril (2016), Irna Setianningrum (2017), Salomi J. Hehanussa (2015), bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Muhammad Firdiansyah Adiwirya (2015) konsisten dengan hasil penelitian ini bahwa variabel keterlibatan pemakai tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

3. Pengaruh partisipatif terhadap kualitas laporan keuangan

Hasil penelitian ini bahwa hipotesis ketiga diterima ( $H_3$ ). Hipotesis ketiga menunjukkan variabel partisipatif terhadap kualitas laporan keuangan dimana nilai signifikannya sebesar  $0,000 < 0,05$ . Jadi dapat

disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Ni Luh Putu Uttari Premananda (2017), Vonny Novisa Amril (2016) bahwa partisipatif memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten bulukumbadapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten Bulukumba dikarenakan pengelolaan keuangan dilakukan tidak terlalu efektif dan program pencapaian tidak sesuai dengan target, dapat dilihat dari hasil pernyataan kuesioner yang dibagikan kepada responden;
2. Akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten Bulukumba dikarenakan program-program yang dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa pengguna anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan public ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dapat dilihat dari hasil pernyataan kuesioner yang dibagikan kepada responden;
3. Partisipatif terdapat pengaruh signifikan atau dengan kata lain berpengaruh positif terhadap laporan keuangan dikarenakan karyawan telah mengetahui dan paham akan tugas yang dikerjakan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran-saran yang penulis ingin berikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi pemerintah daerah untuk tetap meingkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten Bulukumba.
2. Diharapkan bagi pihak manajemen agar lebih sering melakukan evaluasi kinerja secara rutin. Evaluasi yang dilakukan oleh pihak manajemen akan meningkatkan kinerja karyawan.
3. Untuk peneliti selanjutnya, agar dapat menjelaskan beberapa variabel yang menjelaskan 54,5% yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung, "Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik", Yogyakarta: BPFE UGM, 2000.
- Aida Nahar Dan Siti Aliyah, 2012, "Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Jepara".
- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Perbankan*, Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Birgham Dan Houston. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Buku I (Edisi II)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Davis, Keith & John Newstrom. 2004. *Perilaku Dalam Organisasi. Ed. Ketujuh*. Jakarta. Erlangga.
- Febriana F. Albugis. 2016. *Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Krina L.P.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Ni Luh Putu Uttari Premananda. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Denpasar*. Skripsi. Universitas Udayana
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi: Yogyakarta.
- Muhammad Firdiansyah Adiwirya. 2015. *Akuntabilitas, Transparansi Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar*. Skripsi. Universitas Udayana
- Salomi J. Hehanussa. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon*. Skripsi. Universitas Kristen Indonesia Maluku.

Subramanyam, KR dan John, J Wild, 2010. *Analisis Laporan Keuangan*, Buku Satu, Edisi Sepuluh, Salemba Empat, Jakarta.

Surya Pratolo. 2008. *Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Hubungan Dengan Perwujudan Keadilan Dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur Dan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah*. Skripsi. Universtas Muhammadiyah Yogyakarta.

Tari Mellisa Rafar. 2015. *Pengaruh Kompotensi Pengelola Keuangan Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh)*. Tesis. Universitas Syiah Kuala.

Vonny Novisa Amril. 2014. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD*. Artikel. Universitas Negeri Padang.





# LAMPIRAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2030/05/C.4-VIII/V/1440/2019

21 Syawal 1440 H"

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

24 Juni 2019 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

*Kepada Yth,*

Bapak / Ibu Bupati Bulukumba

di –

Bulukumba

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 519/C.4/V/40 H/2019 tanggal 27 Juni 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **FATMAWATI**  
No. Stambuk : **10573 0524 15**  
Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
Jurusan : **Akuntansi**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Analisis Transparansi Akuntabilitas dan Partisipasi terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 24 Juni 2019 s/d 24 Agustus 2019

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

**Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.**

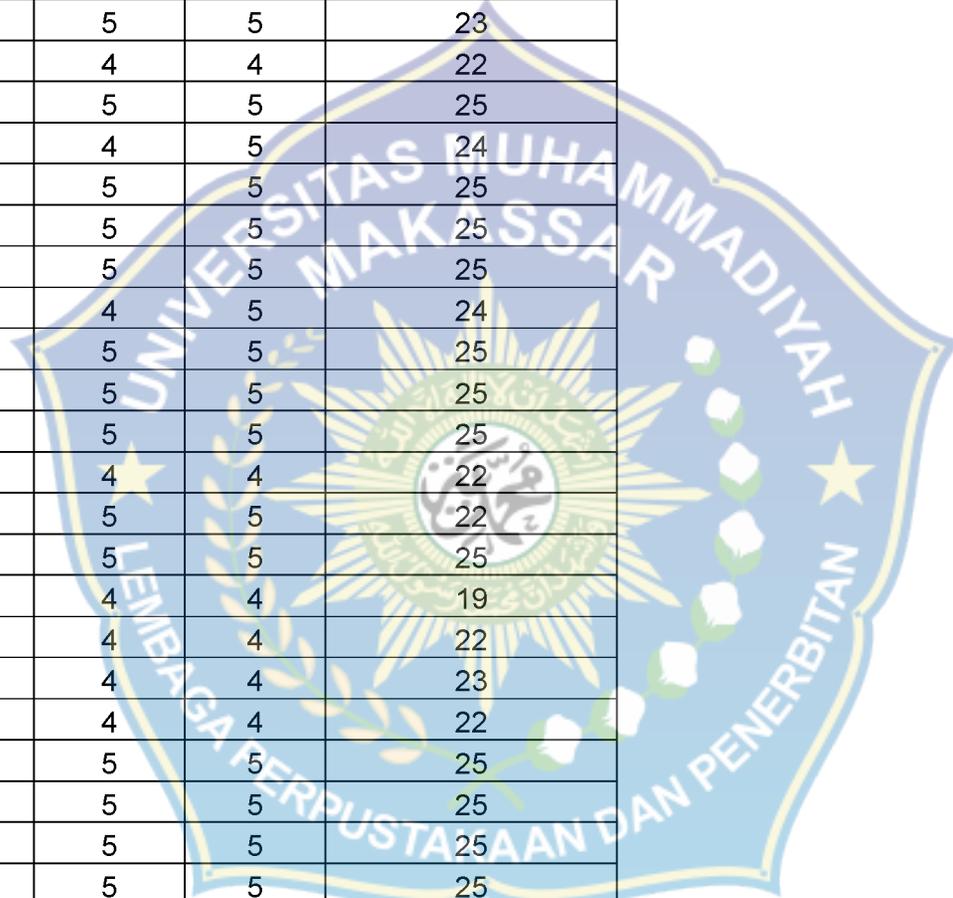
**NBM 101 7716**

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Transparansi	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Akuntabilitas	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Partisipatif
1	5	5	5	5	4	24	5	4	5	4	5	23	4	4	4	4	4	20
2	5	5	5	4	5	24	5	5	4	4	5	23	5	3	4	4	5	21
3	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	3	5	5	5	5	23
4	4	4	5	5	5	23	5	5	5	5	5	25	4	4	5	5	5	23
5	5	5	4	4	4	22	5	5	4	4	4	22	5	5	4	4	4	22
6	5	5	5	5	5	25	5	5	4	5	5	24	5	3	5	5	5	23
7	5	5	5	4	5	24	5	5	3	4	5	22	5	5	5	4	5	24
8	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	3	4	5	5	22
9	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	3	23	5	3	5	5	5	23
10	5	5	5	5	5	25	5	5	4	4	4	22	5	5	4	5	5	24
11	5	5	5	4	5	24	5	5	5	3	5	23	5	5	5	4	5	24
12	5	5	5	5	5	25	3	5	5	5	5	23	5	5	4	4	5	23
13	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	4	4	5	5	23
14	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
15	5	5	4	4	4	22	5	3	4	3	5	20	5	5	4	4	4	22
16	4	4	4	5	5	22	5	4	5	5	5	24	4	4	4	5	5	22
17	5	5	5	5	5	25	5	4	5	4	5	23	5	5	5	5	5	25
18	4	3	4	4	4	19	4	4	4	5	4	21	4	3	4	4	4	19
19	5	5	4	4	4	22	3	4	4	5	5	21	5	5	4	4	4	22
20	5	5	5	4	4	23	5	5	3	4	3	20	5	5	5	4	4	23
21	5	5	4	4	4	22	5	5	5	5	5	25	5	5	4	4	4	22
22	5	5	5	5	5	25	5	5	5	3	5	23	5	5	5	5	5	25
23	5	5	5	5	5	25	5	5	5	4	4	23	5	5	5	5	5	25
24	5	5	5	5	5	25	5	5	3	3	4	20	5	5	5	5	5	25
25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	4	5	5	24
26	5	4	5	5	5	24	5	5	5	5	5	25	5	4	5	5	5	24
27	5	5	5	5	5	25	5	3	5	5	5	23	5	3	5	5	5	23
28	5	4	4	4	4	21	5	5	5	5	5	25	5	4	4	4	4	21
29	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
30	5	5	5	4	4	23	4	4	5	5	5	23	5	5	5	4	4	23
31	5	4	5	4	5	23	4	5	5	5	4	23	5	4	5	4	5	23
32	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
33	5	5	4	5	5	24	4	4	4	4	5	21	5	5	4	5	5	24

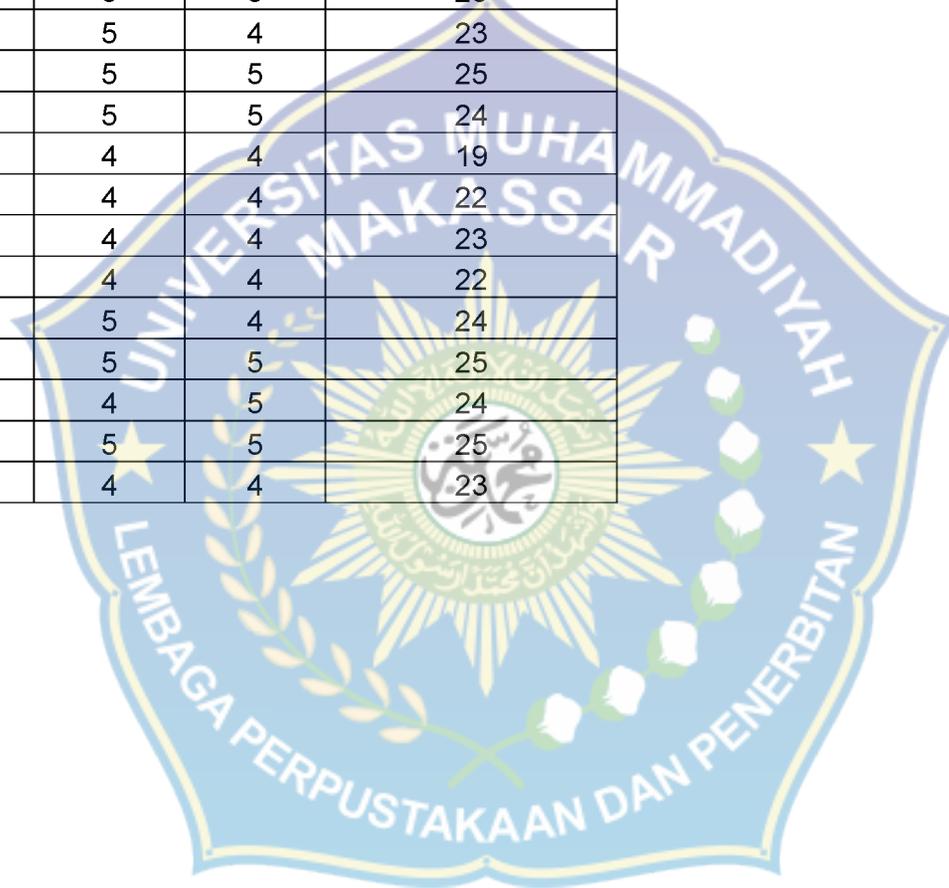
34	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
35	4	3	4	4	4	19	2	4	3	4	4	17	4	3	4	4	4	19
36	5	5	5	5	5	25	5	4	5	5	5	24	5	5	5	5	5	25
37	5	5	5	5	5	25	5	4	4	5	5	23	3	4	3	5	5	20
38	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	4	5	5	24
39	5	5	4	5	4	23	5	5	4	5	4	23	2	3	4	5	4	18
40	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
41	4	5	5	5	5	24	5	5	5	5	5	25	4	5	5	5	5	24
42	4	3	4	4	4	19	4	4	4	3	4	19	4	3	4	4	4	19
43	5	5	4	4	4	22	5	5	5	5	5	25	4	2	4	4	4	18
44	5	5	5	4	4	23	5	5	5	4	4	23	5	5	5	4	4	23
45	5	4	5	4	4	22	5	4	5	5	4	23	5	4	5	4	4	22
46	5	5	5	5	4	24	3	2	2	3	5	15	3	4	4	4	4	19
47	5	5	5	5	5	25	3	5	4	5	5	22	5	4	4	5	5	23
48	5	5	5	4	5	24	5	4	5	3	5	22	5	3	4	4	5	21
49	5	5	5	5	5	25	3	3	4	5	5	20	5	3	4	5	5	22
50	5	5	5	4	4	23	4	5	4	5	4	22	5	3	4	4	4	20



No	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Kualitas Laporan Keuangan
1	5	5	5	5	4	24
2	5	5	5	4	5	24
3	5	5	5	5	5	25
4	4	4	5	5	5	23
5	5	5	4	4	4	22
6	5	5	5	5	5	25
7	5	5	5	4	5	24
8	5	5	5	5	5	25
9	5	5	5	5	5	25
10	5	5	5	5	5	25
11	5	5	5	4	5	24
12	5	5	5	5	5	25
13	5	5	5	5	5	25
14	5	5	5	5	5	25
15	5	5	4	4	4	22
16	4	4	4	5	5	22
17	5	5	5	5	5	25
18	4	3	4	4	4	19
19	5	5	4	4	4	22
20	5	5	5	4	4	23
21	5	5	4	4	4	22
22	5	5	5	5	5	25
23	5	5	5	5	5	25
24	5	5	5	5	5	25
25	5	5	5	5	5	25
26	5	4	5	5	5	24
27	5	5	5	5	5	25
28	5	4	4	4	4	21
29	5	5	5	5	5	25
30	5	5	5	4	4	23
31	5	4	5	4	5	23



32	5	5	5	5	5	25
33	5	5	4	5	5	24
34	5	5	5	5	5	25
35	4	3	4	4	4	19
36	5	5	5	5	5	25
37	5	5	5	5	5	25
38	5	5	5	5	5	25
39	5	5	4	5	4	23
40	5	5	5	5	5	25
41	4	5	5	5	5	24
42	4	3	4	4	4	19
43	5	5	4	4	4	22
44	5	5	5	4	4	23
45	5	4	5	4	4	22
46	5	5	5	5	4	24
47	5	5	5	5	5	25
48	5	5	5	4	5	24
49	5	5	5	5	5	25
50	5	5	5	4	4	23



Lampiran 3d: Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan

Correlations						
	y1	y2	y3	y4	y5	Laporan Keuangan
Pearson Correlation	1	.734**	.369**	.091	.125	.598**
Sig. (2-tailed)		.000	.008	.528	.388	.000
N	50	50	50	50	50	50
Pearson Correlation	.734**	1	.436**	.333*	.301*	.773**
Sig. (2-tailed)	.000		.002	.018	.034	.000
N	50	50	50	50	50	50
Pearson Correlation	.369**	.436**	1	.428**	.585**	.769**
Sig. (2-tailed)	.008	.002		.002	.000	.000
N	50	50	50	50	50	50
Pearson Correlation	.091	.333*	.428**	1	.656**	.720**
Sig. (2-tailed)	.528	.018	.002		.000	.000
N	50	50	50	50	50	50
Pearson Correlation	.125	.301*	.585**	.656**	1	.754**
Sig. (2-tailed)	.388	.034	.000	.000		.000
N	50	50	50	50	50	50
Pearson Correlation	.598**	.773**	.769**	.720**	.754**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
N	50	50	50	50	50	50

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 3a: Uji Validitas Transparansi

		Correlations					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Transparansi
x1	Pearson Correlation	1	.734**	.369**	.091	.125	.598**
	Sig. (2-tailed)		.000	.008	.528	.388	.000
	N	50	50	50	50	50	50
x2	Pearson Correlation	.734**	1	.436**	.333*	.301*	.773**
	Sig. (2-tailed)	.000		.002	.018	.034	.000
	N	50	50	50	50	50	50
x3	Pearson Correlation	.369**	.436**	1	.428**	.585**	.769**
	Sig. (2-tailed)	.008	.002		.002	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50
x4	Pearson Correlation	.091	.333*	.428**	1	.656**	.720**
	Sig. (2-tailed)	.528	.018	.002		.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50
x5	Pearson Correlation	.125	.301*	.585**	.656**	1	.754**
	Sig. (2-tailed)	.388	.034	.000	.000		.000
	N	50	50	50	50	50	50
Transp aransi	Pearson Correlation	.598**	.773**	.769**	.720**	.754**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 3b: Uji Validitas Akuntabilitas

		Correlations					
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Akuntabilitas
x6	Pearson Correlation	1	.409**	.461**	.018	.045	.646**
	Sig. (2-tailed)		.003	.001	.899	.755	.000
	N	50	50	50	50	50	50
x7	Pearson Correlation	.409**	1	.355*	.276	-.160	.633**
	Sig. (2-tailed)	.003		.012	.053	.268	.000
	N	50	50	50	50	50	50
x8	Pearson Correlation	.461**	.355*	1	.434**	.302*	.828**
	Sig. (2-tailed)	.001	.012		.002	.033	.000
	N	50	50	50	50	50	50
x9	Pearson Correlation	.018	.276	.434**	1	.151	.613**
	Sig. (2-tailed)	.899	.053	.002		.295	.000
	N	50	50	50	50	50	50
x10	Pearson Correlation	.045	-.160	.302*	.151	1	.367**
	Sig. (2-tailed)	.755	.268	.033	.295		.009
	N	50	50	50	50	50	50
Akuntabilitas	Pearson Correlation	.646**	.633**	.828**	.613**	.367**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.009	
	N	50	50	50	50	50	50

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 3c: Uji Validitas Partisipatif

		Correlations					
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Partisipatif
x11	Pearson Correlation	1	.301*	.318*	-.028	.261	.614**
	Sig. (2-tailed)		.033	.024	.845	.067	.000
	N	50	50	50	50	50	50
x12	Pearson Correlation	.301*	1	.357*	.149	.195	.724**
	Sig. (2-tailed)	.033		.011	.300	.175	.000
	N	50	50	50	50	50	50
x13	Pearson Correlation	.318*	.357*	1	.234	.300*	.664**
	Sig. (2-tailed)	.024	.011		.102	.034	.000
	N	50	50	50	50	50	50
x14	Pearson Correlation	-.028	.149	.234	1	.725**	.539**
	Sig. (2-tailed)	.845	.300	.102		.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50
x15	Pearson Correlation	.261	.195	.300*	.725**	1	.672**
	Sig. (2-tailed)	.067	.175	.034	.000		.000
	N	50	50	50	50	50	50
Partisipatif	Pearson Correlation	.614**	.724**	.664**	.539**	.672**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Lampiran 4b: Uji Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan (Y)

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
y1	18.80	2.245	.448	.761
y2	18.92	1.667	.570	.723
y3	18.92	1.871	.624	.702
y4	19.06	1.853	.524	.735
y5	19.02	1.816	.580	.714

## Lampiran 4a: Uji Reliabilitas Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif (X)

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	50	100.0

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.808	15

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	64.24	21.492	.355	.803
X1.2	64.36	20.031	.471	.794
X1.3	64.36	20.358	.549	.792
X1.4	64.50	20.255	.495	.794
X1.5	64.46	19.519	.693	.782
X2.1	64.50	19.235	.436	.797
X2.2	64.56	19.721	.393	.800
X2.3	64.62	18.853	.515	.790
X2.4	64.62	20.730	.210	.816
X2.5	64.44	21.068	.259	.808
X3.1	64.46	20.294	.308	.807
X3.2	64.88	19.210	.341	.810
X3.3	64.66	20.311	.424	.797
X3.4	64.56	19.802	.588	.788
X3.5	64.46	19.519	.693	.782

## Lampiran 5: Regression

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.674 <sup>a</sup>	.454	.418	1.275

a. Predictors: (Constant), Partisipatif, Transparansi, Akuntabilitas

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.674 <sup>a</sup>	.454	.418	1.275

a. Predictors: (Constant), Partisipatif, Transparansi, Akuntabilitas

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	62.115	3	20.705	12.739	.000 <sup>b</sup>
	Residual	74.765	46	1.625		
	Total	136.880	49			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Partisipatif, Transparansi, Akuntabilitas

Tabel r untuk df = 1 – 50

df = (N-2)	Tingkat signifikan untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikan untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	<b>0.2787</b>	0.3281	0.3610	0.4514

## Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

Pr	df	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
		0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
	41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
	42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
	43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
	44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
	45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
	46	0.67986	1.30023	1.67866	<b>2.01290</b>	2.41019	2.68701	3.27710
	47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
	48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
	49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
	50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
	51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
	52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
	53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
	54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
	55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
	56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
	57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
	58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
	59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
	60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
	61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
	62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
	63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
	64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
	65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
	66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
	67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
	68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
	69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
	70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
	71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
	72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
	73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
	74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
	75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
	76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
	77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
	78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
	79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
	80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Catatan: probabilitas yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung.

## BIOGRAFI PENULIS



**Fatmawati** adalah Nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Patekkai dan Basse sebagai anak terakhir dari tiga bersaudara. Penulis dilahirkan di kelurahan Ekatiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba pada Tanggal 04 Desember 1995. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 143 Para-Para (lulus tahun 2008), melanjutkan di SMPN 1 Bontotiro (lulus tahun 2011).

Kemudian di SMAN 11 Bulukumba (lulus tahun 2014), dan melanjutkan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2015 sampai sekarang. Penulis juga aktif di dunia organisasi. Dalam dunia organisasi, penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HIMANSI). Dengan ketekunan dan semangat, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan ini mampu memberikan kontribusi yang positif dalam dunia pendidikan.

